

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL DAN SISA
LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA
KABUPATEN DAN KOTA SE JAWA TENGAH**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Akuntansi**



Disusun oleh:

Yogi Febiyanto

NIM 31402300119

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL DAN SISA
LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA
KABUPATEN DAN KOTA SE JAWA TENGAH**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Akuntansi**



Disusun oleh:

Yogi Febiyanto

NIM 31402300119

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN DAN KOTA SE JAWA TENGAH

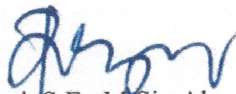
Disusun oleh:

Yogi Febiyanto

NIM 31402300119

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Strudi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 29 November 2024
Pembimbing,



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK. 211403012

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL DAN SISA
LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA
KABUPATEN DAN KOTA SE JAWA TENGAH**

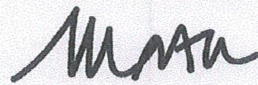
Disusun oleh:

Yogi Febiyanto
NIM 31402300119

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 29 Bulan November 2024

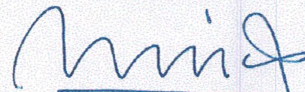
Susunan Dewan Penguji

Penguji,



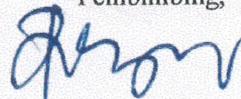
Drs. Osmad Muthaher, SE., M.Si., Akt
NIK. 210403050

Penguji,



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE., M.Si., CSRA, CSRA
NIK. 211415029

Pembimbing,



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK. 211403012

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat
Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 29 Bulan November 2024
Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yogi Febiyanto
NIM : 31402300119
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Sisa lebih pembiayaan anggaran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa Tengah”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 2024

Yang Menyatakan,



Yogi Febiyanto
NIM. 31402300119

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN
DAN KOTA SE JAWA TENGAH**

Oleh :

Yogi Febiyanto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya pada pos pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal dan sisa lebih pembiayaan anggaran yang tertuang dalam APBD terhadap kualitas hidup manusia yang tertuang pada Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2019-2023. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, data ipm diperoleh dari website badan pusat statistik sedangkan data keuangan pemerintah didapat dari website DJPK Kementerian keuangan atau website masing-masing pemerintah daerah.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah regresi linier berganda dengan variable independen berupa pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), belanja modal, dan juga sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang akan di uji pengaruhnya terhadap variable dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable PAD, DAU, dan juga SILPA berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan variable belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih wawasan terhadap pemerintah daerah guna lebih efektif dalam mengelola keuangan pemerintah daerah yang selanjutnya dituangkan dalam berbagai macam progam pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada pemerintah kota/kabupaten di Jawa Tengah.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal. Sisa lebih pembiayaan anggaran, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia, Jawa Tengah, Kabupaten/kota

THE INFLUENCE OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, GENERAL ALLOCATION FUNDS, CAPITAL EXPENDITURES AND THE REMAINING EXCESS BUDGET FUNDING ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN DISTRICTS AND CITIES IN CENTRAL JAVA

By :

Yogi Febiyanto

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of regional government financial performance, especially on regional original income, general allocation funds, capital expenditure and excess budget financing contained in the APBD on the quality of human life as stated in the Human Development Index (HDI) in districts/cities in Central Java province. in the period 2019-2023. Data collection was carried out using secondary data, HDI data was obtained from the website of the central statistics agency (BPS), while government financial data was obtained from the DJPK website of the Ministry of Finance or the websites of each regional government.

The analytical method used in this research is multiple linear regression with independent variables in the form of regional original income (PAD), general allocation funds (DAU), capital expenditure, and also remaining excess budget financing (SILPA) which will be tested for its influence on the dependent variable, namely Human Development Index (HDI)

The results of this research show that the PAD, DAU and SILPA variables have a significant effect on HDI, while the capital expenditure variable does not have a significant effect on HDI.

It is hoped that this research will be able to contribute insight to local governments to be more effective in managing local government finances, which will then be outlined in various government programs aimed at improving the quality of life of the community as reflected by increasing the value of the Human Development Index (HDI), especially in city/district governments. in Central Java.

Keywords: *Original Regional Income, Capital Expenditure. remaining excess budget funding, General Allocation Fund, Human Development Index, Central Java, Regency/City*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsidengan baik yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Sisa lebih pembiayaan anggaran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa Tengah”**.

Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hamnya-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Osmad Mutaher, SE.,M.Si.,Akt selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan masukan dan waktu untuk menguji saya

5. Ibu Dr.Dra.Hj. Winarsih, SE.,M.Si, CSRA, CSRA selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan masukan dan waktu untuk menguji saya
6. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
7. Kepada orang tua saya serta keluarga besar yang telah memberikan do'a, support baik dalam bentuk materi dan moral kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga masih terdapat ketidaksempurnaan dalam Skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulis bahwa hasil Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,
Penulis,

2024



Yogi Febiyanto
NIM. 31402300119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan masalah	10
1.3 Tujuan penelitian.....	10
1.4 Manfaat penelitian	11
BAB II	12
2.1 Landasan Teori (Grand Theory).....	12
2.1.1 Signaling Theory.....	12
2.1.2 Agency Theory	13
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	14
2.1.4 Belanja Modal	14
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
2.1.6 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA).....	17
2.1.7 Dana Alokasi Umum.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	27
2.4 Hipotesis Penelitian	27
2.4.1 Pengaruh Antara Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	28
2.4.2 Pengaruh Antara Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	28

2.4.3 Pengaruh Antara Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	29
2.4.4 Pengaruh Antara Sisa lebih pembiayaan anggaran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	30
BAB III	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Populasi dan Sampel	31
3.3 Sumber dan Jenis Data	32
3.4 Metode pengumpulan	33
3.5 Definisi Variabel Operasional	33
3.5.1 Variabel Independen	34
3.5.2 Variabel Dependen	34
3.6 Alat analisis	38
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif	38
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	38
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda	40
3.6.4 Pengujian Hipotesis	41
BAB IV	43
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	43
4.2 Analisis Data	58
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	58
4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik	61
4.2.3 Pengujian ketepatan model	63
4.3 Pengujian Hipotesis	65
4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda	65
4.3.2 Uji Signifikansi (Uji T)	67
4.4 Pembahasan	69
4.4.1 Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia	69
4.4.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia	72
4.4.3 Hubungan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia ...	73

4.4.4 Hubungan Sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap Indeks Pembangunan Manusia	76
BAB V	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023..	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Variabel Dan Indikator.....	34
Tabel 4. 1 Dana Alokasi Umum Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah	45
Tabel 4. 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah.....	48
Tabel 4. 3 Belanja Modal Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah.....	51
Tabel 4. 4 SiLPA Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah	54
Tabel 4. 5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah	57
Tabel 4. 6 Hasil Uji Analisis statistik deskriptif	58
Tabel 4. 7 Hasil Uji normalitas	61
Tabel 4. 8 hasil uji multikolinearitas.....	62
Tabel 4. 9 hasil uji heterokedasitas	62
Tabel 4. 10 Hasil Uji autokorelasi	63
Tabel 4. 11 hasil uji signifikansi (uji F)	64
Tabel 4. 12 Hasil uji koefisien determinasi (R ²)	65
Tabel 4. 13 Hasil Liner Regresi Rerganda	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis	27
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut *United Nation Development Programme (UNDP)* pembangunan manusia merupakan sebuah proses perluasan bagi penduduk. Tujuan utama adanya pembangunan manusia ini adalah menciptakan sebuah lingkungan yang layak huni bagi masyarakat seperti umur yang Panjang atau angka harapan hidup yang tinggi, kesehatan, dan kehidupan yang produktif, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran capaian pembangunan manusia dengan basis sejumlah indikator dasar kualitas hidup seseorang. Sebagai ukuran atau indikator kualitas tersebut, IPM membangun tiga pendekatan dimensi dasar, dimensi tersebut mencukupi kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dimensi tersebut di pengaruhi oleh banyak faktor. Angka harapan hidup digunakan untuk mengukur dimensi kesehatan, kemudian untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan model gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun pengukuran dimensi hidup yang layak menggunakan indikator daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok atas sandang, pangan, dan papan yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita seseorang dalam satu tahun sebagai pendekatan yang mewakili capaian hidup layak (BPS.go.id)

Konsep pembangunan manusia menitik beratkan peningkatan kualitas hidup masyarakat baik secara fisik, mental, maupun secara spritual. Pembangunan manusia secara fisik dan mental dapat memperbesar kesempatan untuk dapat

berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. pembangunan manusia merupakan salah satu indikator kemajuan sebuah negara, kemajuan suatu negara tidak hanya di hitung pada aspek pendapatan domestic bruto saja, namun juga mencakup angka harapan hidup serta pengetahuan yang maju karena sebuah negara yang maju tidak bias dilihat hanya dengan seberapa besar PDB yang di hasilkan oleh negara tersebut tanpa memperhitungkan aspek pembangunan manusia yang tertuang pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).(IRIANTO et al., 2021)

Indeks pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 menduduki peringkat ke-13 dari total 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan nilai IPM sebesar 73,39 atau mengalami kenaikan sebesar 0,6 jika dibandingkan nilai IPM pada tahun 2022. Capaian ini masuk dalam kategori tinggi jika merujuk pada indikator standar yang di publikasikan oleh UNDP bahwa IPM terdiri dari 4 level kriteria yaitu

- a. Kategori Sangat tinggi (>80)
- b. Kategori tinggi (70-79)
- c. Kategori Sedang (60-69)
- d. Kategori Sedang (<60)

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 kota mempunyai IPM rata-rata selama 5 tahun sebesar 72,388 yang tertera pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten Kota				
	2019	2020	2021	2022	2023
PROVINSI JAWA TENGAH	71,73	71,87	72,16	72,79	73,39
Kabupaten Cilacap	69,98	69,95	70,42	70,99	71,83
Kabupaten Banyumas	71,96	71,98	72,44	73,17	73,86
Kabupaten Purbalingga	68,99	68,97	69,15	69,54	70,24
Kabupaten Banjarnegara	67,34	67,45	67,86	68,61	69,14
Kabupaten Kebumen	69,6	69,81	70,05	70,79	71,37
Kabupaten Purworejo	72,5	72,68	72,98	73,6	74,28
Kabupaten Wonosobo	68,27	68,22	68,43	68,89	69,37
Kabupaten Magelang	69,87	69,87	70,12	70,85	71,45
Kabupaten Boyolali	73,8	74,25	74,4	74,97	75,41
Kabupaten Klaten	75,29	75,56	76,12	76,95	77,59
Kabupaten Sukoharjo	76,84	76,98	77,13	77,94	78,65
Kabupaten Wonogiri	69,98	70,25	70,49	71,04	71,97
Kabupaten Karanganyar	75,89	75,86	75,99	76,58	77,31
Kabupaten Sragen	73,43	73,95	74,08	74,65	75,1

Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten Kota				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Grobogan	69,86	69,87	70,41	70,97	71,49
Kabupaten Blora	68,65	68,84	69,37	69,95	70,63
Kabupaten Rembang	70,15	70,02	70,43	71	71,89
Kabupaten Pati	71,35	71,77	72,28	73,14	73,59
Kabupaten Kudus	74,94	75	75,16	75,89	76,71
Kabupaten Jepara	71,88	71,99	72,36	73,15	73,85
Kabupaten Demak	71,87	72,22	72,57	73,36	74,07
Kabupaten Semarang	74,14	74,1	74,24	74,67	75,13
Kabupaten Temanggung	69,56	69,57	69,88	70,77	71,33
Kabupaten Kendal	71,97	72,29	72,5	73,19	73,86
Kabupaten Batang	68,42	68,65	68,92	69,45	70,2
Kabupaten Pekalongan	69,71	69,63	70,11	70,81	71,4
Kabupaten Pemalang	66,32	66,32	66,56	67,19	68,03
Kabupaten Tegal	68,24	68,39	68,79	69,53	70,23
Kabupaten Brebes	66,12	66,11	66,32	67,03	67,95
Kota Magelang	78,8	78,99	79,43	80,39	81,17
Kota Surakarta	81,86	82,21	82,62	83,08	83,54
Kota Salatiga	83,12	83,14	83,6	84,35	84,99

Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten Kota				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Semarang	83,19	83,05	83,55	84,08	84,43
Kota Pekalongan	74,77	74,98	75,4	75,9	76,71
Kota Tegal	74,93	75,07	75,52	76,15	77,02

IPM terdiri dari beberapa komponen yang digunakan dalam pembentukan indeks yakni indeks kesehatan, indeks Pendidikan, dan indeks pengeluaran. Dari komponen-komponen tersebut dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia maka akan terkait oleh komponen belanja, seperti belanja modal dan juga komponen pendapatan pemerintah daerah seperti Pendapatan Asli Daerah dan juga Dana Alokasi Umum, selain komponen Pendapatan dan Belanja tersebut, terdapat suatu komponen lain yang bisa saja menurut penulis akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia pada suatu daerah, yaitu komponen pada sisi SiLPA atau sisa lebih pembiayaan anggaran, pada intinya komponen SILPA ini merujuk atas adanya sisa anggaran yang tidak terpakai. Sisa anggaran tersebut bisa saja menjadi indikator bahwa adanya kegiatan kegiatan pemerintah yang gagal di jalankan atau tidak di laksanakan sehingga dapat menghambat meningkatnya indeks pembangunan, atau bisa saja sisa tersebut akibat pelaksanaan anggaran yang efisien dan efektif.

Peningkatan Kualitas hidup manusia menjadi negara maju pada tahun 2045, tidak akan bisa terjadi apabila hanya di kerjakan oleh satu atau beberapa stakeholder

saja, namun harus dilakukan secara gotong royong dan bersama-sama termasuk adanya keselarasan visi dan juga misi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu didorong untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan masyarakat agar terjadi pemerataan kualitas hidup manusia pada seluruh daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas adanya peran pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerataan serta kemandirian daerah tersebut Pemerintah melalui UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 mengatur tentang adanya Otonomi Daerah. Otonomi Daerah Merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas adanya sistem otonomi daerah ini, pemerintah daerah dapat mengatur sendiri urusan daerahnya serta dapat membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah asalkan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Implementasi otonomi daerah salah satunya adalah terwujudnya desentralisasi fiskal daerah, yaitu adanya pembagian anggaran atas pusat kepada daerah, lebih lanjut desentralisasi fiskal merujuk pada proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dengan tujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran daerah, namun disisi lain juga memberikan sedikit masalah kepada daerah yang mempunyai Tingkat kesiapan fiskal yang

berbeda-beda kapasitasnya dengan daerah lain. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah ini, maka pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan yang salah satunya adalah Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 poin 21, dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dana daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (block grant). Dana alokasi umum digunakan oleh pemerintah daerah untuk menutup fiscal gap atau celah fiskal antara penerimaan fiskal daerah dengan kebutuhan fiskal daerahnya, dengan adanya Dana Alokasi Umum tersebut maka kebutuhan fiskal daerah setiap daerah dapat terpenuhi atau merata.

Selain dana alokasi umum yang sumber dananya berasal dari transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah juga berhak mengelola kekayaan daerahnya sendiri yang kemudian tertuang dalam pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Besaran Pendapatan asli daerah ini akan berbeda oleh masing-masing daerah, pendapatan asli daerah di daerah kecil akan berbeda dengan pendapatan asli daerah

pada kota besar, hal ini akan berbeda pula dengan Tingkat pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan Masyarakat daerah tersebut yang tertuang pada nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendapatan asli daerah dapat menjadi motor penggerak perekonomian oleh suatu daerah, PAD akan di tuangkan pada porsi APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sumber pendapatan lain yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan anggaran tahun berjalan adalah Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Adanya SiLPA ini menjadi kontroversial dalam pengaruhnya pada indeks pembangunan Manusia, SiLPA dapat mencerminkan adanya kegiatan pemerintah yang batal di laksanakan sehingga menghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi sehingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi terhambat, ataukah sebaliknya munculnya SiLPA ini berkat adanya pelaksanaan anggaran yang efisien dan efektif

Konsep pembangunan manusia dengan cara peningkatan kualitas hidup, tidak terlepas atas adanya program-program pemerintah yang berkelanjutan dan berkesinambungan. berbicara tentang program-program pemerintah berarti merujuk pada pos belanja daerah. salah satu upaya pemerintah yang biasa dilakukan untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan kualitas hidup adalah pemberian bantuan langsung atau bantuan sosial lainnya, program tersebut mungkin saja dapat secara

cepat menuntaskan masalah-masalah kesenjangan sosial yang terjadi, namun menurut penulis hal itu hanyalah solusi jangka pendek saja. dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan diperlukan suatu program yang dapat menunjang adanya peningkatan kualitas hidup seseorang yang berkesinambungan. pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, bendungan dan fasilitas umum merupakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak yang berkelanjutan untuk kualitas hidup manusia. sebagaimana diketahui kegiatan yang melibatkan pembangunan secara fisik tersebut tertuang dalam alokasi belanja modal. belanja modal pemerintah terdiri atas belanja aset tetap dan aset lainnya, seperti pembenahan infrastruktur bidang pendidikan, kendaran publik, dan juga bidang kesehatan yang dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat. oleh karena itu, alokasi belanja khususnya belanja modal seharusnya dilakukan secara efektif dan efisien untuk secara maksimal dapat memberikan mutu pelayanan dan peningkatan kualitas hidup manusia

Pada penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Ida ayu candra dan yunita sari (2016) didapatkan hasil bahwa PAD dan Belanja Modal berpengaruh terhadap IPM, namun pengaruh signifikansi belanja modal ini tidak sejalan dengan penelitian Irianto Dkk (2021) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty Dkk (2023) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap IPM, tetapi DAU tidak berpengaruh pada IPM, sedangkan SiLPA berpengaruh Negatif terhadap IPM. Berangkat dari Research Gap tersebut, penulis berkeinginan meneliti pengaruh variable tersebut terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang didasarkan pada data pemerintah

Kota dan Kabupaten Se Jawa tengah dengan tulisan berjudul “ Pengaruh PAD, DAU,SiLPA, dan belanja modal terhadap IPM pada kabupaten/ kota Se- Provinsi Jawa Tengah”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
3. bagaimana pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
4. Bagaimana pengaruh Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia

3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
5. Untuk mengetahui pengaruh Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

1.4 Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Sisa lebih pembiayaan anggaran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, penulis berharap dapat memberikan manfaat yaitu memberikan sumbangsih penelitian kepada Masyarakat umum dan juga pemangku kepentingan umum di lingkup pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk mempunyai daftar referensi atas pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan asli daerah, Belanja Modal, dan Sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Provinsi jawa Tengah yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori (Grand Theory)

2.1.1 Signaling Theory

Teori signalling yang dikemukakan Spence (1973) menjelaskan bahwa pihak pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima. Dalam kaitannya dalam penelitian ini, signaling theory dapat digunakan untuk menelaah dan menilai bagaimana hasil kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah dengan dibandingkan dengan laporan keuangannya, apakah antara perencanaan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam hal ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diterbitkan untuk umum melalui website pemerintah daerah masing-masing, sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengakses dan juga melakukan analisis apakah realisasi kegiatan pemerintah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam penelitian ini, signaling theory juga dapat digunakan untuk menguji apakah variable-variabel independent yang digunakan oleh penulis mempunyai efek yang positif atau negatif. Variable pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah, seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal ini jika suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah (PAD) yang tergolong tinggi maka seharusnya berbanding lurus dengan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah yang tinggi juga oleh daerah tersebut, namun sebaliknya apabila suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang rendah dan hanya menggantungkan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, maka porsi kegiatan yang tercantum dalam APBD juga akan sedikit atau bisa dikatakan tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah yang mempunyai PAD tinggi

2.1.2 Agency Theory

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh, 2008). Berdasarkan teori keagenan di atas, keputusan manusia juga sarat akan tekanan dari atasan dalam hal ini adalah pejabat pimpinan tinggi daerah tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat sarat akan visi misi oleh masing-masing kepala daerah, isi dari kegiatan tersebut merupakan representasi dari visi-misi kepala daerah tersebut, sebagai contoh seorang kepala daerah pada daerah A mencanangkan penuntasan kemiskinan dengan cara memberikan bantuan social berupa uang tunai maupun kebutuhan pokok langsung kepada masyarakat, maka akan adanya kegiatan tersebut nantinya akan tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada pos belanja bantuan social maupun belanja barang/jasa yang cukup tinggi dibanding pos-pos belanja lainnya. Sebagai gambaran contoh lain, apabila seorang kepala daerah A menginginkan bahwa infrastruktur penunjang daerah menjadi focus yang utama dalam pembangunan daerah, seperti pembanunan jalan, jembatan dan irigasi. Maka atas

kegiatan tersebut, pos belanja modal akan mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada pos-pos belanja yang lain.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index (HDI)* merupakan pengukuran perbandingan atas angka harapan hidup, pendidikan dan juga standar hidup untuk semua negara. IPM dapat di jadikan sebuah indikator untuk menilai apakah negara tersebut negara maju atau tidak. selain itu IPM juga dapat mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. jika kebijakan ekonomi oleh pemerintah yang kemudian di realisasikan pada APBD dapat menciptakan lingkungan yang baik seperti pemenuhan fasilitas publik yang baik dan merata, apabila hal tersebut dapat di penuhi oleh pemerintah maka masyarakat akan merasa nyaman dan dapat melaksanakan aktifitasnya secara lancar yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup yang tercermin pada angka harapan hidup yang tinggi, meningkatnya mutu pendidikan serta standart kehidupan masyarakat.

2.1.4 Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pengertian tersebut dapat disederhanakan menjadi belanja modal adalah segala jenis belanja baik berupa fisik maupun non fisik yang

manfaatnya dapat dirasakan lebih dari satu tahun dan nilainya melebihi nilai minimum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya untuk mengklasifikasikan belanja modal, kita dapat membagi menjadi belanja modal fisik dan non fisik, belanja modal fisik secara sederhana dapat diartikan segala jenis belanja yang hasil atas belanja tersebut dapat dilihat secara fisik, seperti pembelian peralatan mesin maupun pembuatan Gedung, jalan, jembatan, irigasi, maupun jaringan. Sedangkan jenis belanja modal yang berupa non fisik adalah belanja software, lisensi maupun copyright, pembuatan website dan lain halnya. Dalam kaitannya antara belanja modal dan APBD, semakin tinggi pos belanja modal dalam APBD berarti menunjukkan bahwa terdapat kegiatan pemerintah yang menghasilkan manfaat lebih dari satu tahun, dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat maka pos belanja modal seharusnya lebih banyak digunakan untuk pembangunan-pembangunan yang di prioritaskan untuk menunjang fasilitas umum seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan maupun pembangunan-pembangunan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun apa saja kegiatan-kegiatan yang di golongkan menjadi belanja modal dalam satu tahun anggaran oleh pemerintah daerah, nantinya dapat diketahui dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada LKPD.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam buku berjudul “manajemen keuangan daerah” oleh Halim (2004)

disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator untuk mengukur Tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi porsi Pendapatan Asli Daerah mencerminkan bahwa daerah tersebut tidak mempunyai ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun dana bantuan keuangan lainnya, besarnya Tingkat Pendapatan Asli daerah terhadap porsi APBD suatu daerah dalam satu tahun juga menunjukkan Tingkat keberhasilan suatu daerah tersebut terhadap pengelolaan atas sumber-sumber penerimaan di daerah tersebut.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli daerah berasal Dari

1. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-undang No 1. Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menarik pajak daerah sesuai peraturan perundangan, sehingga apabila kewajiban pajak tersebut tidak di bayarkan oleh wajib pajak, maka pemerintah dapat mengakui adanya utang pajak dan bisa memberikan sanksi administrasi.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian ijin atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, bedanya dengan pajak daerah, retribusi daerah memberikan kontraprestasi secara langsung kepada wajib retribusi atas jasa atau ijin tertentu yang dapat dinikmati secara langsung. Adapun jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

Merupakan penerimaan atas penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah berupa bagi hasil atau deviden

4. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah

Merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan No.77 tahun 2020, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, pada dasarnya SiLPA merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat digunakan kembali untuk mendanai kegiatan pada tahun berikutnya. SiLPA dapat dijadikan suatu indikator yang menggambarkan Tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA dapat dijadikan indikator efisiensi, karena SiLPA akan terbentuk jika terjadi surplus pada APBD dan terjadi pembiayaan netto yang positif, Dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pembiayaan.

2.1.7 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut Halim (2016) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana yang bersifat Block Grant, sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya sesuai kebutuhan dan aspirasi daerah masing-masing. Pemerintah pusat memberikan DAU yang bersifat Block Grant dengan tujuan untuk mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan saat ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	IRIANTO ,BAIQ KISNAWATI ISTIARTO, BQ.ERTIN HELMIDA (2021)	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI	Dependen : • Indeks Pembangunan Manusia Independen : • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> • PAD, DAU berpengaruh positif terhadap IPM. • DAK dan Belanja Modal Tidak Berpengaruh terhadap IPM

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil Penelitian
		KHUSUS DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI NUSA	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus • Belanja Modal <p>Sampel dan Populasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 10 kabupaten dan kota di provinsi nusa tenggara barat dalam kurun waktu 2013-2019 	

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil Penelitian
		TENGGARA BARAT)		
2	Hastu Sarkoro, Zulfikar (2016)	DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Empiris pada Pemerintah	<p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Khusus <p>Sampel dan Populasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Daerah dan PAD berpengaruh terhadap IPM • DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial • Secara simultan Belanja Daerah, DAU, DAK, PAD berpengaruh terhadap IPM

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil Penelitian
		Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014)	<ul style="list-style-type: none"> • 33 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2012-2014 	
3	Ida ayu candra yunita sari Ni luh supadmi (2016)	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL PADA PENINGKATAN INDEKS	<p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal <p>Sampel & Populasi :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAD dan Belanja Modal berpengaruh terhadap IPM

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil Penelitian
		PEMBANGUNAN MANUSIA	data diambil 9 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali rentang 2009-2013 dan data IPM 2008-2013.	
4	Anim Rahmayanti Imanda Firmatyas Putri Pertiwi (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Dependen : <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh Terhadap IPM • DAU, DAK,DBH tidak berpengaruh terhadap IPM

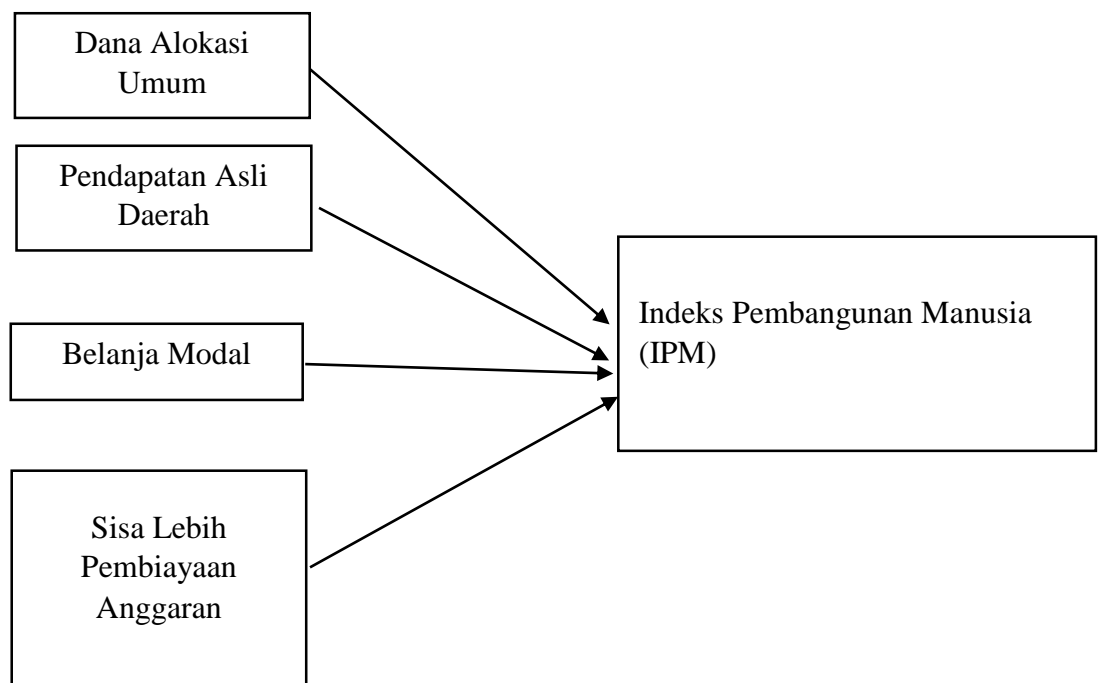
No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil Penelitian
			<p>Sampel :</p> <p>Kabupaten di provinsi jawa tengah selama periode 2015-2016</p>	
5	Verawaty Siti salwa (2023)	PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN, SILPA, KEMISKINAN DAN PENGANGGURA N TERHADAP	<p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • SILPA 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh terhadap IPM • DAU,DAK,DBH tidak berpengaruh pada IPM • SILPA berpengaruh Negatif terhadap IPM

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil Penelitian
		INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA KABUPATEN/KO	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan dan pengangguran Sampel : 17 kabupaten/kota se provinsi sumatera selatan	

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil Penelitian
		TA PROVINSI SUMATERA SELATAN)		

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Model kerangka Penelitian dalam penulisan skripsi ini menempatkan Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Sisa lebih pembiayaan anggaran(SiLPA) sebagai variable independent, adapun variable dependennya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016), Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: (Novita Sari, 2022). Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan kemudian dikaitkan dengan kajian teori yang ada maka dalam penulisan proposal ini, penulis merumuskan Hipotesis penelitian sebagai berikut ini :

2.4.1 Pengaruh Antara Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Umum (DAU) Merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Dana Alokasi umum ini bersifat block grant yang mana peruntukannya dibebaskan oleh pemerintah pusat sebagai pemberi dana tersebut kepada pemerintah daerah. Selain itu Dana Alokasi Umum juga dapat mencerminkan sebara mandiri daerah tersebut dalam mengelola fiscal daerahnya, semakin tinggi alokasi DAU maka semakin tinggi pula ketergantungan Pemerintah daerah tersebut kepada pemerintah Pusat. Pemerintah dapat menggunakan DAU guna menggunakan pelayanan public yang direlaisasikan melalui belanja modal (Solikin,2010). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irianto ,Baiq Kisnawati Istiarto, Bq.Ertin Helmida (2021) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut

H1 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2.4.2 Pengaruh Antara Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indicator untuk mengukur Tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi porsi Pendapatan Asli Daerah mencerminkan bahwa daerah tersebut tidak mempunyai ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun dana bantuan keuangan lainnya, besarnya Tingkat Pendapatan Asli daerah terhadap porsi APBD suatu

daerah dalam satu tahun juga menunjukkan Tingkat keberhasilan suatu daerah tersebut terhadap pengelolaan atas sumber-sumber penerimaan di daerah tersebut. PAD merupakan sumber pembiayaan daerah yang penting untuk mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya, selain itu PAD menjadi tolak ukur suatu daerah untuk memberikan pelayanan public yang lebih maksimal seiring naiknya PAD suatu daerah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2.4.3 Pengaruh Antara Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pengertian tersebut dapat disederhanakan menjadi belanja modal adalah segala jenis belanja baik berupa fisik maupun non fisik yang manfaatnya dapat dirasakan lebih dari satu tahun dan nilainya melebihi nilai minimum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ida ayu candra yunita sari

Ni luh supadmi (2016) menyebutkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan rumusan tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut

H3 : Terdapat Pengaruh signifikan positif antara belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia

2.4.4 Pengaruh Antara Sisa lebih pembiayaan anggaran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, pada dasarnya SiLPA merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat digunakan kembali untuk mendanai kegiatan pada tahun berikutnya. SiLPA dapat dijadikan suatu indikator yang menggambarkan Tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah, selain menjadi salah satu indikator efisiensi, SiLPA juga dapat menjadi tolak ukur kegagalan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan atau dalam kata lain banyak proyek atau kegiatan yang tidak selesai sehingga Masyarakat tidak bisa merasakan dampak atas kebijakan public tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty dan Siti salwa (2023), didapat hasil bahwa SiLPA berpengaruh negative terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasar uraian tersebut penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4 : Terdapat pengaruh signifikan negatif antara Sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap Indeks Pembangunan Manusia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Sugiyono (2016 :7) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti sampel dan populasi penelitian. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menyajikan data berupa angka-angka sebagai hasil penelitiannya.

Menurut Priyono (2016), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, Dana Alokasi Umum, dan belanja modal) yang akan mempengaruhi variabel terikat (Indeks Pembangunan Manusia). Sehingga dapat diketahui besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai "wakil" dari para anggota populasi (Supardi). Jumlah pemerintah daerah yang akan diteliti dalam penelitian ini berjumlah 35 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari bagaimanakah pengaruh PAD, SiLPA,DAU, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Metode pengumpulan sampel dan populasi menggunakan metode purposive sampling metode pengambilan sampel dengan tujuan tertentu dan berkriteria khusus. Adapun keinginan penulis untuk melakukan penelitian ini,sampel yang akan digunakan adalah data PAD,SiLPA, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Data IPM oleh pemerintah kabupaten dan kota dengan rentang waktu 5 tahun

. Adapun kriteria tertentu yang akan di ambil penulis untuk melakukan penelitian ini adalah :

1. Sampel yang diambil merupakan data yang berasal dari laman situs website pemerintah kabupaten / kota masing-masing atau situs resmi lainnya
2. Sampel yang diambil memiliki rentang waktu antara 2019-2023

3.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis data penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Data variable independent yang digunakan untuk penulisan ini yaitu didapat dari data laporan keuangan pemerintah daerah yang di akses melalui website <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> rentang waktu 2019-2023. Adapun data variable dependent yaitu indeks Pembangunan manusia didapat dari laman badan pusat statistic melalui website BPS.go.id

3.4 Metode pengumpulan

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah metode dokumentasi, menurut sugiyono (2014), dokumentasi merupakan cara seseorang untuk memperoleh informasi yang berupa angka atau data informasi yang mana sumber data tersebut berasal dari arsip, dokumen, buku, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan dan keterangan yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian. Penulis melakukan dokumentasi data laporan keuangan pemerintah daerah baik kota dan kabupaten se provinsi jawa Tengah yang didapat dari laman <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> untuk rentang waktu 2019-2023 sebagai dasar pengolahan variable independent. Selain itu, penulis juga melakukan dokumentasi data indeks Pembangunan manusia pada rentang waktu 2019-2023 untuk seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang didapat pada laman BPS.go.id

3.5 Definisi Variabel Operasional

Definisi operasional variabel merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi atau petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional juga dapat membantu peneliti yang lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Menurut Sugiono (2019:221), definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya

3.5.1 Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variable yang mempengaruhi atau variable penyebab perubahan suatu variable dependent atau variable terikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variable independent yaitu PAD,DAU SiLPA dan Belanja Modal

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan variable yang terpengaruh atau variable terikat yang merupakan hasil atas pengaruh variable bebas atau variable independent. Dalam penulisan ini indeks Pembangunan manusia digunakan sebagai variable terikat atau variable dependent

Tabel 3. 1 Variabel Dan Indikator

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Variabel Dependen			
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia di dasarkan pada 4 variabel pada booklet metode baru, yaitu : Angka Harapan hidup saat lahir (AHH),Angka harapan lama sekolah (HLS), Rata-rata lama sekolah (RLS), dan Pengeluaran Perkapita yang di sesuaikan	<p>apaian IPM antar wilayah dapat di lihat melalui indikator nilai IPM sebagai berikut yaitu</p> <p>a. Kategori Sangat tinggi (>80)</p> <p>b. Kategori tinggi (70-79)</p> <p>c. Kategori Sedang (60-69)</p> <p>d. Kategori Sedang (<60)</p> <p>Untuk Mendapatkan data 29 kabupaten dan 6 kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat diakses langsung melalui website</p>

<https://jateng.bps.go.id/indicator/26/83/1/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru-.html>

Variabel Independen				
1	Dana Alokasi Umum	Dana alokasi umum merupakan jenis dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tujuan adanya dana transfer ini adalah untuk membuat pemerataan fiscal kepada daerah, agar celah fiscal dapat tertutupi, dana alokasi umum bersifat block grant, yang artinya pemerintah daerah dapat bebas memanfaatkan untuk kegiatan yang di inginkan atau di prioritaskan oleh daerah tersebut	umum	dalam penulisan ini, penulis mendapatkan data Dana Alokasi Umum dengan cara sebagai berikut
				Dana Alokasi Umum : Pos pendapatan pada APBD tahun berjalan
2	Pendapatan Asli Daerah	Definisi pendapatan asli daerah menurut Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan segala bentuk pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah	asli	cara untuk mengetahui besaran pendapatan asli daerah pemerintah kota semarang dalam tahun yang di inginkan dengan cara sebagai berikut :
				Pendapatan Asli Daerah : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan

tersebut. Pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan juga lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah dapat juga dikatakan sebagai penambah kekayaan atau penambah kapasitas fiskal daerah, secara logika berpikir dapat dikatakan jika suatu daerah mempunyai pendatan asli daerah yang tergolong tinggi maka daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan atas operasional daerah tersebut tanpa memiliki ketergantungan yang besar dari pemerintah pusat

3	Belanja modal	Belanja Modal Merupakan jenis pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi, contoh dari jenis	Adapun cara memperoleh data belanja modal tersebut adalah sebagai berikut
---	---------------	--	---

Belanja Modal : Laporan Keuangan Pemerintah Audited dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

belanja modal adalah pengeluaran yang bertujuan untuk pembangunan Gedung, jalan, irigasi, jembatan, peralatan mesin dll. Jenis belanja modal tidak juga terbatas pada aset yang mempunyai fisik berwujud saja namun juga meliputi aset tidak berwujud seperti pembelian software, pembuatan situs website, dan juga lisensi. Pada penelitian ini, penulis ingin memfokuskan tentang berapa pagu anggaran belanja modal pada sector infrastruktur penunjang pelayanan umum seperti pembuatan jalan, irigasi, dan juga jembatan

4	Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)	Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) terjadi karena nilai realisasi belanja daerah kurang dari anggaran yang telah ditetapkan, sebuah contoh SiLPA adalah ketika suatu SKPD mempunyai	Pada penelitian ini, penulis mendapatkan nilai SiLPA dengan cara sebagai berikut
			$\text{SiLPA} : \text{Pendapatan daerah} - \text{belanja} + \text{pembiayaan}$

anggaran belanja sebesar 450 milyar namun sampai akhir periode tahun bersangkutan nilai realisasi hanya berkisar sebanyak 400 milyar, maka akan terjadi sisa atas anggaran tersebut sebesar 50 milyar. Atas sisa anggaran tersebut nilainya akan dibawa atau dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada periode anggaran selanjutnya

3.6 Alat analisis

Alat analisis yang dipergunakan penulis untuk melakukan pengujian dalam penelitian ini menggunakan teknologi komputer yaitu aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkah atau teknik yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif menyajikan gambaran data secara umum meliputi rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan juga standar deviasi oleh masing-masing variabel independen dan juga dependen

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Tahapan pertama pengujian dari penelitian ini adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan prasyarat sebelum melakukan pengujian pada tahap

selanjutnya. Uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji data yang diambil penulis guna menghasilkan model regresi yang sudah memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Apabila didapatkan hasil bahwa data yang digunakan penulis sudah memenuhi kriteria BLUE maka data tersebut dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya dan handal. Dimana estimator tersebut dipastikan terdistribusi normal, tidak bias, konsisten dan juga handal. Untuk mengetahui apakah model regresi atas data yang dikumpulkan sudah memenuhi kriteria BLUE maka perlu dilakukan serangkaian pengujian seperti Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang akan digunakan untuk uji hipotesis telah terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat statistik yaitu uji kolmogov-sminov. Pada pengujian kolmogov-sminov data dikatakan memenuhi uji normalitas dan memenuhi kriteria BLUE apabila telah terdistribusi secara normal.

3.6.2.2 Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel saling terhubung secara linear atau saling berkorelasi. Model regresi ini dikatakan memenuhi syarat BLUE apabila tidak terdapat multikolinieritas. Multikolinieritas dapat diketahui dengan melakukan pengujian Nilai VIF dan tolerance dari masing masing variabel bebas yang digunakan pada penelitian kali ini.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi atas variabel variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai keragaman eror yang sama atau tidak. Keseragaman eror yang sama akan disebut dengan homoskedastisitas, sedangkan apabila terdapat keseragaman eror yang tidak sama atau tidak konstan maka akan disebut Heteroskedastisitas. Pengujian yang memenuhi kriteria BLUE merupakan data yang tidak mengandung Heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini peneliti menguji apakah variabel yang digunakan mengandung Heteroskedastisitas melalui pengujian Uji Gletser dimana melakukan uji regresi variabel bebas pada nilai residual yang telah diabsolutkan Nilai residual ini dihasilkan melalui analisis regresi linier berganda pada data penelitian.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah model regresi atas variabel variabel yang digunakan mempunyai korelasi antara eror pada pengamatan satu dengan eror pada pengamatan lainnya. Data akan dinyatakan memenuhi kriteria BLUE apabila pada data yang diteliti tidak mengandung autokorelasi.pada penelitian kali ini peneliti akan menggunakan uji runis test untuk mengetahui apakah data yang di gunakan mengandung autokorelasi atau tidak.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan pengujian hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variable dependen. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan

variabel dependen, apakah masing-masing variable independen berhubungan positif atautkah negatif. Dengan semakin banyaknya variabel bebas berarti semakin tinggi pula kemampuan regresi yang dibuat untuk menerangkan variabel terikat atau peran faktor-faktor lain di luar variable bebas yang digunakan. Hal ini dicerminkan oleh residual atau error yang semakin kecil (Nachrowi, 2006)

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

β_0 = Konstanta

β = Koefisien Regresi (Nilai Peningkatan ataupun Penurunan)

X1 = Belanja Modal

X2 = Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)

X3 = Dana alokasi umum

X4 = Pendapatan Asli Daerah

e = error term

3.6.4 Pengujian Hipotesis

3.6.4.1 Uji Koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana model mempengaruhi variabel dependennya. Semakin tinggi nilai R² maka semakin besar pula peran variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

3.6.4.2 Uji Signifikansi t

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel dependen yang dilakukan menggunakan uji signifikansi parameter individual pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis 5% .

Dasar pengambilan keputusan adalah:

Jika $\text{Sig} \leq 0.05$ maka : H_a diterima

Jika $\text{Sig} \geq 0.05$ maka : H_a ditolak

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Provinsi Jawa Tengah terletak di Tengah pulau jawa yang berbatasan langsung pada sisi timur dengan provinsi jawa timur, pada sisi Selatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada sisi barat dengan provinsi jawa barat, selain itu provinsi jawa Tengah diapit oleh dua sisi laut, pada sisi utara yaitu laut jawa sedangkan pada sisi selatan diapit oleh Samudra hindia. Secara geografis Jawa Tengah berada diantara $5^{\circ}40'$ - $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}30'$ - $111^{\circ}30'$ Bujur Timur. Secara resmi provinsi jawa Tengah berdiri pada tanggal 15 agustus 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Adapun luas wilayahnya mencapai $34.337,49 \text{ km}^2$ dengan kabupaten terluas terletak pada kabupaten cilacap dengan luas wilayah sebesar $2.124,50 \text{ km}^2$ dengan penduduk sebesar 2.3 juta jiwa, sedangkan kabupaten terkecil yaitu kabupaten kudus dengan luas wilayah sebesar 425 km^2 dengan jumlah penduduk sebesar 750 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk di jawa tengah sendiri sebesar 37.61 juta jiwa

Topografi jawa Tengah sangat bervariasi, mulai dari dataran rendah yang terletak di pesisir utara hingga dataran tinggi pada wilayah Tengah hingga daerah selatan. Topografi yang beragam tersebut menopang sektor utama perekonomian jawa tengah yang didominasi oleh pertanian. Selain pertanian terdapat berbagai Kawasan industri yang terletak pada beberapa kabupaten dan kota.

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang beragam. Keberagaman tersebut didukung dengan adanya desentralisasi fiskal daerah dan juga otonomi daerah membuat berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah leluasa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerahnya untuk dituangkan ke dalam program-program yang menunjang kesejahteraan Masyarakat, ukuran Tingkat Kesejahteraan Masyarakat tersebut dapat dilihat melalui besaran indikator salah satunya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan rilis terbaru oleh BPS pada tahun 2023 provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai IPM sebesar 73,39 dengan menempati urutan ke 13 se-Indonesia. Masih tergolongnya rendahnya nilai IPM di provinsi Jawa Tengah tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak ragam faktor, namun salah satu faktor meningkatnya kesejahteraan Masyarakat dalam suatu daerah tidak akan lepas dari andil oleh pemerintah setempat yang dituangkan dalam program-programnya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut, adapun pos-pos APBD yang mungkin dapat mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang tertuang dalam nilai IPM tersebut antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan juga SiLPA. Data sumber yang akan digunakan untuk penelitian ini disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 4. 1 Dana Alokasi Umum Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah

no	Kabupaten/kota	DAU				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Semarang	1.001.565.375.000,00	909.555.622.000,00	897.099.063.000,00	891.568.328.394,00	941.195.190.979,00
2	Kab. Kendal	998.236.127.000,00	909.781.219.000,00	901.552.517.000,00	894.555.629.032,00	946.737.605.230,00
3	Kab. Demak	946.467.336.000,00	860.873.465.000,00	856.411.409.000,00	856.459.969.000,00	872.433.475.808,00
4	Kab. Grobogan	1.144.560.870.000,00	1.038.763.632.000,00	1.034.216.110.000,00	1.028.708.507.451,00	1.083.175.438.083,00
5	Kab. Pekalongan	974.248.885.000,00	885.145.414.000,00	871.067.401.000,00	867.457.562.000,00	913.291.118.000,00
6	Kab. Batang	817.365.659.000,00	743.088.164.000,00	737.685.667.000,00	734.763.251.000,00	772.544.083.000,00
7	Kab. Tegal	1.198.561.641.000,00	1.086.704.382.000,00	1.077.039.778.000,00	1.072.103.946.393,00	1.146.028.561.807,00
8	Kab. Brebes	1.373.396.371.000,00	1.241.906.073.000,00	1.238.589.246.000,00	1.230.091.817.360,00	1.331.727.139.428,00
9	Kab. Pati	1.240.426.635.000,00	1.115.340.333.000,00	1.107.122.582.000,00	1.105.492.441.400,00	1.161.832.590.236,00
10	Kab. Kudus	851.036.584.000,00	757.097.370.000,00	747.504.503.000,00	741.118.818.488,00	783.691.043.815,00
11	Kab. Pemasang	1.223.060.205.000,00	1.118.791.154.000,00	1.107.792.827.000,00	1.103.835.467.035,00	1.178.380.360.243,00

no	Kabupaten/kota	DAU				
		2019	2020	2021	2022	2023
12	Kab. Jepara	1.039.864.085.000,00	934.338.029.000,00	928.866.409.000,00	923.623.240.772,00	964.513.786.848,00
13	Kab. Rembang	799.760.392.000,00	727.781.396.000,00	718.204.574.000,00	712.540.260.625,00	748.462.980.648,00
14	Kab. Blora	966.559.787.000,00	871.294.279.000,00	863.598.364.000,00	860.369.771.896,00	906.388.749.905,00
15	Kab. Banyumas	1.437.036.239.000,00	1.306.921.916.000,00	1.289.633.614.000,00	1.280.141.707.164,00	1.352.843.702.304,00
16	Kab. Cilacap	1.423.200.397.000,00	1.281.940.170.000,00	1.272.865.794.000,00	1.268.988.917.120,00	1.340.928.127.268,00
17	Kab. Purbalingga	918.228.685.000,00	841.051.988.000,00	830.050.600.000,00	829.967.362.159,00	873.966.993.979,00
18	Kab. Banjarnegara	999.003.344.000,00	900.564.784.000,00	895.961.511.000,00	892.597.544.600,00	940.264.211.000,00
19	Kab. Magelang	1.097.366.974.000,00	987.675.947.000,00	975.017.297.000,00	970.712.969.712,00	1.022.451.050.283,00
20	Kab. Temanggung	828.948.502.000,00	762.027.309.000,00	753.140.119.000,00	751.613.837.000,00	791.039.886.585,00
21	Kab. Wonosobo	877.474.203.000,00	799.113.605.000,00	792.381.589.000,00	790.688.710.540,00	832.084.548.325,00
22	Kab. Purworejo	963.312.191.000,00	930.205.439.000,00	913.937.548.000,00	909.104.885.900,00	957.767.136.834,00
23	Kab. Kebumen	1.279.681.428.000,00	1.197.504.293.000,00	1.179.288.910.000,00	1.173.705.068.800,00	1.239.930.914.430,00
24	Kab. Klaten	1.282.250.122.000,00	1.167.212.792.000,00	1.149.421.184.000,00	1.144.695.548.127,00	1.209.400.877.465,00
25	Kab. Boyolali	1.045.669.922.000,00	956.428.556.000,00	944.891.188.000,00	943.068.359.125,00	991.414.365.752,00

no	Kabupaten/kota	DAU				
		2019	2020	2021	2022	2023
26	Kab. Sragen	1.083.308.681.000,00	991.204.614.000,00	984.484.500.000,00	979.305.029.339,00	1.031.504.587.630,00
27	Kab. Sukoharjo	946.104.486.000,00	859.146.406.000,00	847.875.034.000,00	842.689.434.000,00	889.657.591.230,00
28	Kab. Karanganyar	1.018.544.740.000,00	917.524.339.000,00	903.630.027.000,00	901.571.566.683,00	934.937.369.768,00
29	Kab. Wonogiri	1.181.037.066.000,00	1.074.092.865.000,00	1.059.941.416.000,00	1.055.086.211.969,00	1.114.870.746.616,00
30	Kota Semarang	1.317.186.595.000,00	1.183.614.821.000,00	1.167.622.970.000,00	1.153.121.976.661,00	1.208.211.990.718,00
31	Kota Salatiga	469.967.335.000,00	425.080.208.000,00	418.013.566.000,00	417.175.271.746,00	440.735.874.040,00
32	Kota Pekalongan	475.842.089.000,00	433.354.907.000,00	426.399.738.000,00	424.427.248.179,00	451.200.064.000,00
33	Kota Tegal	502.969.026.000,00	458.758.336.000,00	451.704.750.000,00	450.267.705.038,00	473.312.096.000,00
34	Kota Magelang	455.177.029.000,00	416.722.396.000,00	409.629.499.000,00	407.860.999.000,00	430.485.816.061,00
35	Kota Surakarta	879.123.635.000,00	794.665.771.000,00	781.825.148.000,00	776.550.616.614,00	809.121.510.137,00

Tabel 4. 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah

no	kabupaten/kota	PAD				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Semarang	429.011.081.257,00	442.528.167.477,97	575.748.297.606,00	480.302.999.649,00	530.154.806.743,00
2	Kab. Kendal	350.500.849.956,00	356.753.593.703,00	439.197.987.791,00	437.899.634.626,73	543.919.550.404,83
3	Kab. Demak	407.400.540.994,55	439.694.424.385,95	445.010.135.308,79	477.198.401.098,80	508.105.346.277,83
4	Kab. Grobogan	344.559.032.450,00	350.453.524.065,00	424.186.340.266,00	424.751.554.830,00	432.851.207.798,00
5	Kab. Pekalongan	341.344.415.574,51	341.901.469.549,15	346.599.468.113,00	342.971.185.262,55	384.481.026.028,06
6	Kab. Batang	245.836.087.092,28	257.422.866.095,00	322.789.372.917,64	300.965.373.375,01	327.784.151.481,65
7	Kab. Tegal	436.003.392.413,29	439.931.567.174,60	591.004.284.313,00	531.150.278.017,50	553.338.257.851,44
8	Kab. Brebes	379.091.298.714,05	392.541.730.819,14	518.511.128.704,00	419.395.415.995,14	479.936.145.391,01
9	Kab. Pati	363.997.151.178,00	371.708.005.192,00	388.644.537.358,00	388.754.867.176,00	441.001.976.769,00
10	Kab. Kudus	343.824.122.868,00	383.892.971.961,00	507.167.074.775,00	418.705.145.589,40	502.363.111.755,60
11	Kab. Pemasang	350.559.139.753,00	328.375.466.698,00	365.393.902.790,00	349.130.621.188,00	363.617.077.022,00

no	kabupaten/kota	PAD				
		2019	2020	2021	2022	2023
12	Kab. Jepara	384.979.296.768,00	419.363.320.517,00	408.635.274.883,00	427.516.690.043,00	446.096.656.064,00
13	Kab. Rembang	308.445.489.137,31	326.670.124.350,50	404.100.646.578,00	353.094.781.382,53	342.024.786.722,57
14	Kab. Blora	246.863.066.484,00	299.687.660.301,00	326.770.477.077,00	325.966.473.177,00	359.488.807.356,00
15	Kab. Banyumas	686.805.512.326,17	668.211.148.299,00	761.991.440.173,00	822.685.992.141,84	854.942.206.458,16
16	Kab. Cilacap	574.276.795.303,59	591.343.787.160,48	739.133.833.863,79	700.428.762.449,02	768.640.705.768,55
17	Kab. Purbalingga	305.996.806.188,00	313.618.688.781,00	377.882.022.370,39	306.197.569.020,00	341.097.401.340,77
18	Kab. Banjarnegara	257.700.650.110,00	238.638.994.321,00	313.830.623.336,00	284.507.773.825,00	335.497.270.938,00
19	Kab. Magelang	417.178.099.961,00	329.769.193.224,00	375.378.465.373,00	432.688.035.341,00	465.486.053.517,00
20	Kab. Temanggung	278.313.775.793,00	307.488.084.365,00	363.128.342.571,00	308.705.886.109,00	350.283.014.437,00
21	Kab. Wonosobo	238.371.743.591,00	251.724.091.045,00	339.745.535.241,00	264.942.660.020,00	267.058.875.925,91
22	Kab. Purworejo	280.396.155.599,65	304.800.202.905,00	438.264.776.270,00	330.274.511.807,79	379.937.415.349,53
23	Kab. Kebumen	409.163.433.329,68	403.025.963.783,80	472.017.087.115,00	512.346.375.475,00	463.650.961.705,00
24	Kab. Klaten	311.648.401.655,44	329.963.261.898,00	315.304.009.782,00	358.048.103.989,00	339.095.872.692,00
25	Kab. Boyolali	395.431.863.402,00	451.543.582.894,00	514.970.001.433,00	444.693.170.145,00	806.462.657.593,00

no	kabupaten/kota	PAD				
		2019	2020	2021	2022	2023
26	Kab. Sragen	368.325.799.601,00	394.464.906.604,00	537.265.408.211,00	364.484.878.491,00	406.014.146.980,00
27	Kab. Sukoharjo	458.742.223.869,00	469.540.567.890,00	528.354.094.902,00	495.282.321.890,00	537.102.489.624,00
28	Kab. Karanganyar	387.763.013.239,00	384.682.993.533,00	426.649.591.411,95	511.737.349.879,05	441.862.394.424,00
29	Kab. Wonogiri	287.221.631.013,15	274.293.129.950,00	241.300.072.883,00	332.811.150.760,00	287.870.652.802,00
30	Kota Semarang	2.066.333.418.588,00	2.024.537.808.307,00	2.385.944.758.477,00	2.545.991.747.658,00	2.835.150.144.867,00
31	Kota Salatiga	236.086.898.372,00	219.539.400.332,00	280.684.937.797,00	240.959.878.632,00	284.536.299.558,00
32	Kota Pekalongan	212.777.435.293,00	229.867.935.360,95	252.037.004.472,02	263.475.949.166,00	263.355.736.830,00
33	Kota Tegal	285.575.788.984,16	266.580.982.102,00	308.116.840.289,00	340.054.969.233,00	336.843.881.515,00
34	Kota Magelang	273.582.932.151,00	290.756.816.510,00	319.391.277.825,00	377.367.945.305,00	324.669.631.605,00
35	Kota Surakarta	546.020.008.117,00	492.776.208.640,00	560.579.997.086,00	647.440.585.331,00	687.326.602.700,00

Tabel 4. 3 Belanja Modal Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah

no	kabupaten/kota	BELANJA MODAL				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Semarang	393.472.095.964,00	219.069.909.089,00	292.001.109.109,00	368.030.881.190,00	255.139.158.673,00
2	Kab. Kendal	283.503.675.627,00	108.455.011.780,00	141.147.838.380,00	338.360.021.568,00	305.971.196.198,00
3	Kab. Demak	455.482.429.713,00	286.913.547.351,00	279.922.485.672,00	344.301.366.485,00	272.530.936.118,00
4	Kab. Grobogan	448.666.101.416,00	338.711.253.077,00	290.180.602.809,00	462.228.846.802,00	363.900.001.617,00
5	Kab. Pekalongan	345.165.297.652,00	239.471.535.400,00	208.046.317.066,00	261.155.583.894,00	266.777.590.935,00
6	Kab. Batang	211.778.239.648,00	152.870.895.295,00	196.084.228.826,00	183.195.271.255,00	139.566.988.711,00
7	Kab. Tegal	434.393.482.658,00	248.977.818.850,00	368.877.462.091,00	313.682.560.331,00	358.320.634.457,00
8	Kab. Brebes	621.919.531.365,00	432.556.254.864,00	439.319.806.903,00	480.672.283.614,00	357.922.041.899,00
9	Kab. Pati	405.100.296.549,00	315.613.926.745,00	271.122.015.437,00	240.760.188.095,00	212.133.396.273,00
10	Kab. Kudus	278.210.578.665,00	221.806.162.432,00	155.227.921.015,00	379.321.092.925,00	418.859.551.370,00
11	Kab. Pemasang	347.657.852.647,00	342.593.987.691,00	180.049.321.707,00	150.611.740.899,00	217.207.125.026,00
12	Kab. Jepara	325.214.472.023,00	266.275.554.085,00	231.972.750.951,00	196.295.754.705,00	210.162.498.752,00
13	Kab. Rembang	207.071.429.379,00	154.123.440.858,00	187.286.320.101,00	280.273.201.664,00	306.994.695.651,00

no	kabupaten/kota	BELANJA MODAL				
		2019	2020	2021	2022	2023
14	Kab. Blora	466.887.346.008,00	349.064.685.820,00	298.444.143.812,00	507.666.732.865,02	362.495.787.332,00
15	Kab. Banyumas	478.797.497.271,00	363.470.409.584,00	432.235.246.229,00	479.036.065.598,00	333.503.478.957,00
16	Kab. Cilacap	663.321.198.006,20	462.431.933.784,00	583.816.848.983,00	537.110.858.819,00	468.852.514.719,00
17	Kab. Purbalingga	262.136.781.292,00	130.334.116.841,00	196.964.893.644,00	239.861.001.003,00	139.110.836.234,00
18	Kab. Banjarnegara	358.205.528.802,00	348.505.249.709,00	294.844.828.809,00	191.794.043.374,00	238.397.698.407,00
19	Kab. Magelang	386.529.995.844,00	214.407.058.402,00	251.160.713.253,00	304.002.891.493,00	318.001.060.309,00
20	Kab. Temanggung	223.249.187.567,00	102.083.054.523,00	235.995.614.408,00	247.089.139.440,00	174.714.127.567,00
21	Kab. Wonosobo	430.765.650.280,00	243.001.724.523,00	256.221.238.680,00	363.437.214.857,00	329.902.098.408,00
22	Kab. Purworejo	327.413.701.413,50	254.015.009.152,00	266.462.622.108,00	419.618.626.696,00	263.302.583.155,00
23	Kab. Kebumen	365.840.794.028,00	288.801.049.018,00	266.110.950.340,00	272.301.599.864,00	278.842.913.538,00
24	Kab. Klaten	308.145.403.976,00	157.126.719.574,00	189.606.772.936,00	246.670.020.742,00	295.594.876.519,00
25	Kab. Boyolali	530.593.843.520,00	405.110.958.145,00	443.846.199.415,00	567.084.220.580,00	453.924.865.491,00
26	Kab. Sragen	249.326.386.054,00	268.507.459.807,00	211.772.001.931,00	351.881.445.556,00	433.411.157.251,00
27	Kab. Sukoharjo	350.577.750.659,00	238.738.380.776,00	283.872.873.485,00	220.460.187.459,00	292.716.698.098,00

no	kabupaten/kota	BELANJA MODAL				
		2019	2020	2021	2022	2023
28	Kab. Karanganyar	286.884.774.876,00	148.559.342.370,00	193.819.710.155,00	253.014.014.897,00	253.636.703.797,00
29	Kab. Wonogiri	565.091.976.630,87	291.314.088.408,00	364.807.421.927,00	301.736.553.631,00	372.938.739.227,00
30	Kota Semarang	1.054.761.429.772,00	506.420.330.795,00	953.669.847.701,88	1.048.844.590.189,00	1.089.358.396.203,00
31	Kota Salatiga	183.724.641.420,00	174.131.330.590,00	130.277.078.909,00	75.192.210.131,00	91.952.972.131,00
32	Kota Pekalongan	182.153.984.579,00	126.926.093.953,00	160.513.725.170,00	196.569.439.074,00	170.653.380.598,00
33	Kota Tegal	165.982.915.065,00	148.142.669.908,00	146.322.223.928,00	144.275.946.307,00	90.739.155.652,00
34	Kota Magelang	272.055.204.204,00	116.558.397.390,00	186.005.847.297,00	154.810.803.251,00	151.577.167.563,00
35	Kota Surakarta	543.578.176.920,00	250.969.805.187,00	341.100.953.660,00	380.832.881.832,00	380.390.555.685,00

Tabel 4. 4 SiLPA Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah

no	kabupaten/kota	SiLPA				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Semarang	175.630.364.280,11	188.708.254.800,08	405.905.362.672,08	192.027.517.955,00	176.913.975.342,00
2	Kab. Kendal	97.690.214.753,00	182.030.482.268,00	415.802.117.392,00	151.214.322.832,73	103.116.777.477,56
3	Kab. Demak	225.039.224.475,55	245.029.903.753,50	242.258.937.642,29	142.637.921.267,09	517.919.957.349,92
4	Kab. Grobogan	134.760.672.754,00	103.184.864.771,00	236.131.928.732,00	204.941.975.873,00	145.791.639.021,00
5	Kab. Pekalongan	159.856.594.942,22	163.759.759.877,37	161.260.112.626,81	106.680.281.662,36	100.347.797.505,17
6	Kab. Batang	122.728.564.505,86	174.895.334.920,00	207.392.784.038,77	144.452.864.570,78	511.593.393.509,43
7	Kab. Tegal	88.931.882.896,96	218.096.097.806,02	297.025.506.051,02	281.204.116.830,52	236.131.976.034,96
8	Kab. Brebes	166.136.668.498,43	181.482.467.546,57	185.749.436.555,29	70.790.262.873,43	134.300.816.811,44
9	Kab. Pati	200.858.279.012,00	101.021.374.734,00	202.686.393.626,00	173.654.717.384,00	199.106.007.788,00
10	Kab. Kudus	190.917.348.813,00	288.295.764.737,00	546.563.701.925,00	390.912.730.096,40	281.048.700.096,00
11	Kab. Pemasang	347.906.316.058,00	123.924.362.435,00	197.195.413.709,00	155.751.465.867,00	160.944.214.155,00
12	Kab. Jepara	169.442.313.992,00	209.475.363.067,00	269.190.834.125,00	141.815.630.459,00	51.906.520.041,00
13	Kab. Rembang	40.143.795.816,80	65.325.181.073,10	133.340.384.031,56	28.562.969.761,38	19.703.524.024,37

no	kabupaten/kota	SILPA				
		2019	2020	2021	2022	2023
14	Kab. Blora	97.852.691.370,00	112.205.265.151,00	225.528.507.790,00	145.955.777.733,00	114.427.043.588,00
15	Kab. Banyumas	242.705.123.481,00	294.230.476.359,00	369.896.692.236,00	262.505.937.756,84	246.746.334.764,00
16	Kab. Cilacap	280.865.946.057,32	324.581.581.509,80	314.067.155.485,79	185.663.674.098,54	140.070.528.423,09
17	Kab. Purbalingga	129.993.761.009,00	179.575.632.903,00	224.246.511.372,00	113.064.503.748,00	106.675.085.957,85
18	Kab. Banjarnegara	88.157.618.246,00	41.383.052.390,00	84.518.650.266,00	74.454.123.167,00	52.668.790.294,00
19	Kab. Magelang	218.827.197.859,00	287.691.856.102,00	328.578.382.309,00	286.776.557.722,00	157.408.613.305,00
20	Kab. Temanggung	123.395.072.830,00	162.448.209.105,00	254.248.460.087,00	180.406.907.044,00	141.586.102.661,00
21	Kab. Wonosobo	148.138.414.810,00	154.455.652.466,00	252.073.772.483,00	138.291.994.868,00	98.025.712.684,91
22	Kab. Purworejo	87.840.209.775,83	148.165.025.028,00	284.268.607.572,00	134.779.576.984,79	88.488.386.636,32
23	Kab. Kebumen	202.667.918.416,18	219.950.309.565,98	269.179.627.198,98	258.817.350.877,98	164.691.485.769,98
24	Kab. Klaten	382.909.001.110,28	440.659.044.325,28	493.720.575.841,28	529.593.676.302,00	292.955.732.383,00
25	Kab. Boyolali	103.943.445.939,00	133.810.972.513,00	282.664.858.993,00	159.785.469.819,00	460.774.902.134,00
26	Kab. Sragen	376.284.038.362,00	342.587.257.374,00	515.914.283.227,00	394.537.252.889,00	244.375.337.713,00
27	Kab. Sukoharjo	420.458.357.396,00	358.453.599.194,00	361.683.602.117,00	304.412.025.326,00	233.237.051.431,00

no	kabupaten/kota	SILPA				
		2019	2020	2021	2022	2023
28	Kab. Karanganyar	197.446.953.259,00	177.762.280.332,00	175.425.049.814,95	184.282.573.893,00	129.819.343.715,00
29	Kab. Wonogiri	226.968.126.139,00	235.330.763.490,00	237.884.968.274,00	252.273.586.720,00	283.066.705.881,00
30	Kota Semarang	80.734.946.278,00	288.545.560.942,00	279.624.248.290,00	318.939.094.263,00	288.372.856.863,00
31	Kota Salatiga	219.457.736.483,00	155.741.332.512,00	142.431.115.304,00	127.159.087.219,00	98.153.002.474,00
32	Kota Pekalongan	95.101.710.311,61	112.542.301.590,00	115.326.671.183,02	63.120.549.575,00	53.939.115.006,00
33	Kota Tegal	143.906.714.598,75	195.305.482.588,75	136.586.295.761,75	38.478.028.423,00	15.600.975.718,75
34	Kota Magelang	107.045.397.946,00	251.514.967.769,00	299.613.433.828,00	195.911.386.714,00	155.395.381.599,00
35	Kota Surakarta	105.310.864.321,26	291.894.539.353,26	314.315.289.323,00	254.430.584.768,88	129.260.379.074,88

Tabel 4. 5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah

no	kabupaten/kota	IPM				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Semarang	74,14	74,1	74,24	74,67	75,13
2	Kab. Kendal	71,97	72,29	72,5	73,19	73,86
3	Kab. Demak	71,87	72,22	72,57	73,36	74,07
4	Kab. Grobogan	69,86	69,87	70,41	70,97	71,49
5	Kab. Pekalongan	69,71	69,63	70,11	70,81	71,4
6	Kab. Batang	68,42	68,65	68,92	69,45	70,2
7	Kab. Tegal	68,24	68,39	68,79	69,53	70,23
8	Kab. Brebes	66,12	66,11	66,32	67,03	67,95
9	Kab. Pati	71,35	71,77	72,28	73,14	73,59
10	Kab. Kudus	74,94	75	75,16	75,89	76,71
11	Kab. Pemasang	66,32	66,32	66,56	67,19	68,03
12	Kab. Jepara	71,88	71,99	72,36	73,15	73,85
13	Kab. Rembang	70,15	70,02	70,43	71	71,89
14	Kab. Blora	68,65	68,84	69,37	69,95	70,63
15	Kab. Banyumas	71,96	71,98	72,44	73,17	73,86
16	Kab. Cilacap	69,98	69,95	70,42	70,99	71,83
17	Kab. Purbalingga	68,99	68,97	69,15	69,54	70,24
18	Kab. Banjarnegara	67,34	67,45	67,86	68,61	69,14
19	Kab. Magelang	69,87	69,87	70,12	70,85	71,45
20	Kab. Temanggung	69,56	69,57	69,88	70,77	71,33
21	Kab. Wonosobo	68,27	68,22	68,43	68,89	69,37
22	Kab. Purworejo	72,5	72,68	72,98	73,6	74,28
23	Kab. Kebumen	69,6	69,81	70,05	70,79	71,37
24	Kab. Klaten	75,29	75,56	76,12	76,95	77,59
25	Kab. Boyolali	73,8	74,25	74,4	74,97	75,41
26	Kab. Sragen	73,43	73,95	74,08	74,65	75,1
27	Kab. Sukoharjo	76,84	76,98	77,13	77,94	78,65
28	Kab. Karanganyar	75,89	75,86	75,99	76,58	77,31
29	Kab. Wonogiri	69,98	70,25	70,49	71,04	71,97
30	Kota Semarang	83,19	83,05	83,55	84,08	84,43
31	Kota Salatiga	83,12	83,14	83,6	84,35	84,99
32	Kota Pekalongan	74,77	74,98	75,4	75,9	76,71
33	Kota Tegal	74,93	75,07	75,52	76,15	77,02

no	kabupaten/kota	IPM				
		2019	2020	2021	2022	2023
34	Kota Magelang	78,8	78,99	79,43	80,39	81,17
35	Kota Surakarta	81,86	82,21	82,62	83,08	83,54

4.2 Analisis Data

Populasi studi ini sebanyak 35 pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 2019-2023 sehingga sampel yang di gunakan dalam penelitian ini sebanyak 175 sampel. Sampel di dapatkan melalui tahapan yang telah ditentukan pada bab sebelumnya

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pada analisis statistik deskriptif, pengukuran statistik ini dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum untuk masing-masing variabel meliputi variabel DAU, PAD, Belanja Modal, SILPA, dan juga IPM. Adapun data yang di analisis meliputi rata-rata nilai (*mean*), nilai data tertinggi (*max*), nilai data terendah (*min*), dan nilai standar deviasi, data tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini yang diolah menggunakan analisis statistik deskriptif software IBM SPSS.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Analisis statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1 =DAU	175	4.08E+11	1.44E+12	9.3114E+11	2.40745E+11
X2= PAD	175	2.13E+11	2.84E+12	4.5754E+11	3.55396E+11
X3= BELANJA MODAL	175	7.52E+10	1.09E+12	3.1103E+11	1.60780E+11
X4= SILPA	175	1.56E+10	5.47E+11	2.0537E+11	1.09529E+11
Y=IPM	175	66.11	84.99	73.0838	4.42924
Valid N (listwise)	175				

Berdasarkan data diatas, hasil statistik deskriptif dapat di jabarkan sebagai berikut ini

1. Dana Alokasi Umum terendah terjadi pada tahun 2022 untuk kota magelang dengan jumlah dana alokasi umum sebesar Rp. 407.860.999.000,00 sedangkan jumlah dana alokasi umum tertinggi terjadi pada tahun 2019 di kabupaten banyumas dengan jumlah sebesar Rp. 1.437.036.239.000,00 sedangkan rata-rata penerimaan dana alokasi umum pada pemerintah kabupaten/kota di jawa tengah adalah sebesar Rp. 931.136.243.724,44 . tinggi rendahnya dana alokasi umum ini dapat mengindikasikan tingkat kemandirian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dikarenakan dana transfer tersebut berasal dari pemerintah pusat yang tujuannya untuk pemerataan fiskal kepada daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah terendah terjadi pada tahun 2019 di kota pekalongan dengan jumlah PAD sebesar Rp. 212.777.435.293,00, sedangkan pendapatan asli daerah tertinggi didapatkan kota semarang dengan jumlah sebesar Rp. 2.835.150.144.867,00 pada tahun 2023. Rata-rata PAD untuk kabupaten/kota di jawa tengah adalah sebesar Rp. 457.536.716.588,90 . semakin tinggi nilai PAD mencerminkan semakin mandirinya kabupaten/kota tersebut dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya yang menurunkan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.
3. Nilai belanja modal terendah terjadi pada tahun 2022 dikota salatiga dengan jumlah belanja modal sebesar Rp. 75.192.210.131,00 sedangkan nilai belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2023 di kota semarang dengan jumlah belanja modal sebesar Rp. 2.835.150.144.867,00 .rata-rata pengeluaran

pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk sektor belanja modal adalah sebesar Rp. 311.031.494.958,42. Belanja modal merupakan komponen utama belanja pemerintah dalam menunjang pelayanan publik guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, contoh belanja modal yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat antara lain jalan, irigasi, dan juga jembatan.

4. Sisa lebih pembiayaan anggaran terendah terjadi pada Kota Tegal pada tahun 2023 dengan jumlah silpa sebesar Rp. 15.600.975.718,75 sedangkan SiLPA tertinggi terjadi pada tahun 2021 di Kabupaten Kudus dengan jumlah SiLPA sebesar Rp. 546.563.701.925,00. Adapun rata-rata jumlah SiLPA untuk kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 205.367.246.843,48. Tinggi rendahnya SiLPA ini dapat bermakna seperti pedang bermata dua, SiLPA yang tinggi bisa saja mengindikasikan efisiensi anggaran pemerintah yang tinggi namun di sisi lain tingginya SiLPA dapat juga bermakna tidak tercapainya target pemerintah atau program-program yang gagal di jalankan.
5. Nilai IPM tertinggi didapatkan Kota Salatiga pada tahun 2023 dengan total nilai sebesar 84,99 sedangkan nilai IPM terendah didapatkan oleh Kabupaten Brebes pada tahun 2020 dengan total nilai IPM 66,11. Adapun rata-rata nilai IPM untuk kabupaten/kota dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 73,08. Tinggi rendahnya IPM menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah.

4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi-asumsi klasik pada penelitian ini meliputi pengujian normalitas, multikolinearitas, heterokedasitas, dan autokorelasi

4.2.2.1 Uji Normalitas

Pada uji normalitas penelitian ini memakai uji nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan memakai metode asymp 2-tailed, monte carlo, dan juga exact. Pada uji ini apabila didapat hasil lebih besar daripada 0,05 maka data terdistribusi normal, namun jika hasil uji kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

Tabel 4. 7 Hasil Uji normalitas

Model	asymp-2 tailed	monte carlo	exact	kriteria	simpulan
<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	0,036	0,339	0,341	$p > 0,05$	data terdistribusi normal

Dari hasil uji diatas didapat nilai *Kolmogorov-Smirnov* dengan metode asymo 2-tailed sebesar 0,036 yang berarti data tidak terdistribusi normal, namun jika menggunakan metode monte carlo didapat nilai sebesar 0.339 dan metode exact sebesar 0.341 yang berarti data berdistribusi normal, maka dapat disimpulkan data pada penelitian ini berdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui interaksi antar variabel independen pada model regresi yang akan di analisis. Pada uji ini data disebut tidak terjadi multikolinearitas apabila memenuhi 2 syarat yaitu, nilai tolerance $>0,1$ dan nilai VIF <10 . Adapun hasil uji tersebut dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 8 hasil uji multikolinearitas

Variabel	nilai tolerance	nilai VIF	Simpulan
DAU	0,612	1,633	tidak terjadi multikolinearitas
PAD	0,401	2,493	tidak terjadi multikolinearitas
BELANJA MODAL	0,315	3,179	tidak terjadi multikolinearitas
SiLPA	0,861	1,161	tidak terjadi multikolinearitas

Pada hasil uji diatas, dapat disimpulkan semua data tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.2.3 Uji Heterokedasitas

Tujuan dari analisis uji ini adalah menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians antara residual dengan model regresi yang akan diuji. Pada uji ini digunakan uji gletser untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedasitas. Syarat data tidak terjadi heterokedasitas adalah ketika nilai hasil uji signifikansi nya lebih dari 0.05. adapun hasil uji heterokedasitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 9 hasil uji heterokedasitas

variabel	nilai sig	kriteria	simpulan
DAU	0,066	$p > 0,05$	tidak terjadi heterokedasitas
PAD	0,435	$P > 0,05$	tidak terjadi heterokedasitas
BELANJA MODAL	0,553	$P > 0,05$	tidak terjadi heterokedasitas

variabel	nilai sig	kriteria	simpulan
SILPA	0,255	$P > 0,05$	tidak terjadi heterokedasitas

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah model regresi atas variabel variabel yang digunakan mempunyai korelasi antara eror pada pengamatan satu dengan eror pada pengamatan lainnya. pada uji ini metode yang digunakan adalah metode durbin watson, adapun syarat tidak terjadi autokorelasi adalah jika nilai durbin watson kurang dari nilai 4-DU, dan lebih dari nilai DU. Nilai DU dapat diperoleh dari tabel durbin watson dengan cara mencocokkan jumlah sampel dan jumlah variabel. Hasil dari analisis durbin watson untuk penelitian ini adalah sebagai berikut ini

Tabel 4. 10 Hasil Uji autokorelasi

durbin watson	DU	4-DU	kriteria	SIMPULAN
2,12	1,7996	2,2004	$DU < DW < 4-DU$	tidak terjadi autokorelasi

Pada data diatas didapat hasil uji durbin watson sebesar $1.7996 < 2.210 < 2.2004$ oleh karena itu data pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

4.2.3 Pengujian ketepatan model

4.2.3.1 Uji Signifikansi simultan (Uji F)

Tujuan uji analisis ini adalah untuk mengerti apakah semua variabel independen berpengaruh simultan kepada variabel dependen atau tidak. Uji ini

dikaji dengan cara membandingkan antara F-hitung dengan F- Tabel. Jika didapat nilai F hitung lebih besar daripada nilai F-tabel maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima dan variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.pada pengujian ini model regresi juga dinyatakan fit apabila nilai sig yang dihasilkan kurang dari 0,05. Adapun hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 11 hasil uji signifikansi (uji F)

F-Hitung	Sign	F-tabel	Simpulan
47,471	0,000	2,420	variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen

Sumber : data sekunder yang diolah dengan spss

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam model ini didapat nilai F-hitung sebesar 47.471 yang lebih besar daripada nilai F-tabel sebesar 2.42, selain itu nilai sig sebesar 0.00 yang kurang dari 0,05 hal ini berarti model regresi dinyatakan fit.

4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji R2 digunakan untuk menjabarkan sejauh mana model mempengaruhi variabel dependen, dalam melakukan uji ini peneliti menggunakan nilai adjusted R2 sebagai ukuran koefisien determinasi. Adapun nilai hasil uji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini

Tabel 4. 12 Hasil uji koefisien determinasi (R²)

Model	R	R square	Adjusted R Square
1	0,726	0,528	0,517

Sumber : data sekunder yang diolah dengan spss

Dari hasil uji diatas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R square sebesar 0.517 yang berarti dalam model analisis regresi ini mempengaruhi sebesar 51.7 % pada variabel dependen yaitu IPM, sedangkan 48,3% lainnya dipengaruhi variabel lain diluar model regresi ini.

4.3 Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis berganda untuk menguji interaksi antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang di olah menggunakan *software IBM SPSS*. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut ini

Tabel 4. 13 Hasil Regresi Linear Berganda

variabel	koefisien	t-hitung	sign	simpulan
Konstanta	78,847	82,239	0,000	berpengaruh signifikan
DAU	-1,197E-11	-9,661	0,000	berpengaruh signifikan
PAD	7,170E-12	6,912	0,000	berpengaruh signifikan
BELANJA MODAL	9,307E-13	0,359	0,720	tidak berpengaruh
SILPA	8,846E-12	3,852	0,000	berpengaruh signifikan

Sumber : data sekunder diolah menggunakan SPSS

4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda atas data diatas menggunakan software SPSS menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut ini :

$$Y = 78,847 - 1,197E-11X_1 + 7,170E-12X_2 + 9,307E-13X_3 + 8,846E-12 X_4$$

Penjabaran dari rumus diatas adalah :

- a. Dari hasil uji diatas nilai konstanta didapat sebesar 78,847 yang menunjukkan bahwa jika semua variable independen bernilai 0 maka nilai IPM berada pada nilai 78,847
- b. Koefisien regresi pada variabel DAU bernilai -1,197E-11. Nilai dari koefisien variabel tersebut berarti jika Dana Alokasi Umum naik sebesar satu satuan, maka nilai IPM akan berkurang sebesar -1,197E-11. Semakin rendah nilai Dana Alokasi Umum berarti akan semakin menaikkan nilai IPM.
- c. Koefisien regresi pada variabel PAD bernilai 7,170E-12. Nilai dari koefisien variabel tersebut berarti jika Pendapatan Asli Daerah naik sebesar satu satuan, maka nilai IPM akan bertambah sebesar 7,170E-12. Semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah akan semakin menaikkan nilai IPM.
- d. Koefisien regresi pada variabel Belanja Modal bernilai 9,307E-13. Nilai dari koefisien variabel tersebut berarti jika Belanja Modal naik sebesar satu satuan, maka nilai IPM akan bertambah sebesar 9,307E-13. Semakin tinggi nilai Belanja Modal akan semakin menaikkan nilai IPM.
- e. Koefisien regresi pada variabel SILPA bernilai 8,846E-12. Nilai dari koefisien variabel tersebut berarti jika SILPA naik sebesar satu satuan, maka nilai IPM akan bertambah sebesar 8,846E-12. Semakin tinggi nilai SILPA maka akan semakin menaikkan nilai IPM.

4.3.2 Uji Signifikansi (Uji T)

Uji T digunakan untuk menentukan sejauh mana variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini level signifikansi yang digunakan adalah 0,05 ($\alpha = 5\%$) untuk semua variabel independen. Dalam uji statistik T ini, variabel independen dianggap berpengaruh apabila nilai T hitung $>$ T tabel (apabila nilai T bernilai Positif) atau nilai T hitung $<$ T tabel (apabila nilai T bernilai negatif). Jika hasil analisis menunjukkan tidak terpenuhinya 2 syarat tersebut maka hipotesis di tolak.

Pada penelitian ini menggunakan jumlah sample sebanyak 175 dan jumlah variabel sebanyak 4 maka didapat nilai T-tabel sebesar 1,97393 untuk sisi kanan, dan -1,97393 untuk sisi kiri.

Adapun hasil analisis Uji signifikansi T pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

a. **Dana Alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

pada tabel diatas didapat nilai Uji T untuk variabel dana alokasi umum sebesar -9,661. Karena nilai t bernilai negatif maka digunakan rumus jika T hitung $<$ T tabel berarti variabel independen tersebut berpengaruh signifikan dengan variabel dependennya, selain itu diperoleh nilai sig bernilai 0,000 hal ini berarti menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh pada IPM, namun jika di kombinasikan dengan nilai koefisien beta yang bernilai -

1,197E-11 hal ini menunjukkan terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap IPM namun berpengaruh negatif, atas hasil uji ini maka **(H1) ditolak**.

b. **Pendapatan Asli daerah Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

pada tabel diatas didapat nilai uji T untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 6,912 yang berarti nilai tersebut lebih besar daripada nilai T-tabel sebesar 1,97393 dan nilai sig sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien beta sebesar 7,170E-12 yang bernotasi positif. Atas hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Atas hasil uji tersebut maka **(H2) : Diterima**

c. **Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

pada tabel diatas didapat bahwa nilai T tabel atas variabel belanja modal sebesar 0,359 yang berarti kurang dari nilai T tabel sebesar 1,97393, sedangkan nilai sig diperoleh sebesar 0,72 yang berarti lebih besar dari 0,05, adapun nilai koefisien beta sebesar 9,307E-13 bernotasi positif. Atas hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap nilai indeks pembangunan manusia, maka atas hasil uji tersebut **(H3) : Ditolak**

d. **Sisa Lebih Pembiayaan anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia**

Pada tabel diatas didapat nilai T hitung untuk variabel SiLPA sebesar 3,852 yang berarti lebih besar daripada nilai T -tabel sebesar 1,97393, sedangkan nilai sig atas variabel tersebut sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Adapun koefisien beta untuk variabel ini adalah sebesar 8,846E-12 yang bernotasi positif. Atas hasil tersebut maka variable SILPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai IPM, hal ini bertentangan terhadap hipotesis awal yaitu SILPA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, oleh karena itu **(H4) ditolak**

4.4 Pembahasan

4.4.1 Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan

Manusia

Pada penelitian ini, hipotesis pertama yang diajukan yaitu dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hasil uji atas penelitian yang di lakukan ternyata hipotesis tersebut ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap IPM yang ditunjukkan dengan nilai sig 0,000, nilai sig ini kurang dari nilai signifikansi 0,05 sehingga dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap IPM, namun koefisien regresi beta atas variabel ini sebesar -9,661 yang bernotasi negatif, hal ini ini tentunya bertentangan dari hipotesis awal karena atas hasil koefisien regresi tersebut yang bernotasi negatif berarti bahwa kenaikan nilai dana alokasi umum setiap satu-satuan akan menurunkan nilai indeks pembangunan manusia. Selama 5 tahun terakhir atau sama dengan rentang waktu

penelitian ini, nilai dana alokasi umum tertinggi untuk kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah didapat oleh kabupaten banyumas dengan nilai dana alokasi umum sebesar Rp. 1.437.036.239.000,00 pada tahun 2019. Dana alokasi umum sebagaimana diketahui adalah salah satu dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mana sifat dari dana tersebut adalah *block grant* atau dibebaskan penggunaannya sesuai kewenangan daerah, skema perhitungan DAU ini didasarkan atas alokasi anggaran dasar ditambah dengan celah fiskal. Alokasi anggaran dasar perhitungannya didasarkan atas jumlah pegawai negeri sipil pada daerah tersebut dan besaran belanja gaji dengan memperhatikan kebijakan lain terkait penggajian, adapun celah fiskal adalah nilai selisih antara kebutuhan fiskal daerah dikurangi dengan kemampuan fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah meliputi anggaran-anggaran dasar yang dibutuhkan pemerintah dalam menjalankan pelayanan dasar umum terhadap masyarakat. Atas rumusan perhitungan dana alokasi umum tersebut berarti daerah-daerah yang kurang mampu memenuhi kebutuhan fiskalnya tentunya akan mendapat alokasi dana umum dari pemerintah dengan mempertimbangkan luas wilayah dan juga jumlah penduduknya. Melihat skema perhitungan dana alokasi umum tersebut dapat kita lihat kembali pada jumlah dana alokasi umum pada kabupaten banyumas yang mendapat total DAU tertinggi selama 5 tahun terakhir ini, kabupaten banyumas mempunyai luas wilayah sekitar 1.327,60 km² dengan jumlah penduduk sebesar 1,829 juta. Menurut data yang diambil dari website badan pusat statistik kabupaten banyumas, roda perekonomian atas daerah tersebut di tunjang oleh sektor pertanian dan perikanan. Menurut data LKPD kabupaten banyumas pada pos

catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2019, ternyata kabupaten banyumas banyak mengalokasikan anggaran dana alokasi umum untuk sektor belanja gaji pegawai, dengan alokasi belanja gaji dan tunjangan pns sebesar Rp.859.264.107.093 yang berarti sebesar 59,79 % dari total dana alokasi umum yang diterima kabupaten banyumas, secara keseluruhan belanja gaji oleh kabupaten banyumas adalah sebesar Rp.1.317.180.709.881,00. Atas besaran angka belanja pegawai tersebut, mungkin saja faktor penyebab variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh secara positif terhadap naiknya indeks pembangunan manusia adalah karena alokasi dana alokasi umum tersebut sebagian besar masih digunakan untuk mencukupi anggaran dasar untuk operasional pemerintah daerah yang manfaatnya tidak secara langsung dirasakan kepada masyarakat umum.

Hasil penelitian ini, jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Irianto ,Baiq Kisnawati Istiarto, Bq.Ertin Helmida (2021)) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan, hasil penelitian lain yang telah dilakukan oleh Verawaty Siti salwa (2023) menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap IPM. Hasil penelitian yang telah dilakukan ini, menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di provinsi jawa tengah.

4.4.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan

Manusia

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia, dalam penelitian ini hipotesis tersebut dinyatakan diterima. Hasil uji signifikansi menunjukkan nilai sig 0,000 yang berarti kurang dari signifikansi 0,05, selain itu diperoleh koefisien regresi sebesar 7,170E-12 yang bernotasi positif. Hipotesis yang diterima mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai pendapatan asli daerah oleh suatu daerah maka akan semakin pula menaikkan nilai indeks pembangunan manusia pada daerah tersebut. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber langsung dari daerah tersebut, bukan atas pendapatan transfer bantuan keuangan dari pemerintah pusat, adapun tinggi rendahnya nilai pendapatan asli daerah berarti menunjukkan tingkat kemandirian dan berkembangnya suatu daerah tersebut, semakin tinggi nilai pendapatan asli daerah maka mengindikasikan semakin rendahnya ketergantungan daerah tersebut kepada pemerintah pusat, begitupun sebaliknya semakin rendahnya pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Adapun pos-pos yang menjadi komponen pendapat asli daerah adalah pajak daerah dan juga retribusi daerah, tarif atas pajak daerah dan retribusi tersebut besarnya akan berbeda oleh masing-masing daerah tergantung dengan tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah tersebut. Atas hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah mencerminkan tingginya pula indeks pembangunan manusia oleh suatu daerah tersebut, namun hal yang perlu digaris bawahi adalah pemerintah daerah

tidak harus serta merta menaikkan pajak daerah dan juga retribusi daerah agar pendapatan asli daerah dapat terdongkrak naik, kenaikan atau tercapainya target pendapatan asli daerah tersebut harus diawali dengan naiknya taraf hidup masyarakat pada daerah tersebut, sebagai contoh daerah yang pajak daerah dan retribusinya tergolong tinggi harus diimbangi dengan layakknya pendapatan minimum bagi pekerja atau masyarakat yang tinggal pada daerah tersebut. Pada intinya pemerintah harus menyiapkan sarana pendukung yang menunjang naiknya kesejahteraan masyarakat agar mampu mencapai jumlah pendapatan daerah yang di harapkan seperti pembukaan sektor-sektor ekonomi baru agar terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hastu Sarkoro, Zulfikar (2016) dan Irianto ,Baiq Kisnawati Istiarto, Bq.Ertin Helmida (2021) yang menyatakam bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia.

4.4.3 Hubungan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia, pada hasil uji regresi linier berganda pada penelitian ini, ternyata hipotesis tersebut ditolak. Hasil uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,72 yang lebih dari nilai sig 0,05 menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia walau dalam hasil uji ini variabel tersebut mendapatkan koefisien beta sebesar $9,307E-13$ yang mempunyai notasi

positif. Berdasarkan hasil uji tersebut, alokasi belanja modal yang dilakukan oleh kabupaten/kota se-provinsi jawa tengah pada kurun waktu 2019-2023 tidak berpengaruh dalam indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai tertinggi alokasi belanja modal dilakukan oleh pemerintah kota semarang pada tahun 2023 dengan total belanja modal sebesar Rp.1.089.358.396.203,00 sedangkan alokasi belanja modal terendah terjadi pada tahun 2022 di kota salatiga dengan total alokasi belanja modal sebesar Rp. 75.192.210.131,00, adapun nilai rata-rata belanja modal untuk pemerintah daerah di provinsi jawa tengah dalam kurun waktu 2019-2023 ini adalah sebesar . Dapat dilihat pada nilai rata-rata tersebut jika dibandingkan dengan nilai rata-rata variabel lain dalam penelitian ini tergolong lebih rendah, hal tersebut berarti jumlah alokasi belanja modal yang seharusnya dialokasikan untuk pembuatan atau perbaikan sarana prasarana guna pelayanan umum kepada masyarakat masih tergolong kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh masing-masing kabupaten kota tersebut. Selain itu terdapat faktor lain yang menurut penulis menjadi salah satu faktor mengapa belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia adalah adanya pandemi covid-19 yang melanda indonesia selama rentang periode 2019-2021, adanya pandemi tersebut membuat penganggaran atau program-program pemerintah mengalami *refocusing* anggaran atau pemindahan rekening anggaran belanja, sebagai contoh pada tahun 2019 pemerintah kota semarang merealisasikan anggaran sebesar Rp.3.576.946.715.447 untuk pos belanja operasi,jika ditelisik dalam laporan keuangan pemerintah daerah

kota semarang tahun anggaran 2019 pada catatan atas laporan keuangan, pos belanja operasi tersebut selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kota dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat juga digunakan untuk melakukan penanggulangan pandemi covid-19, yang dialokasikan pada pos belanja barang/jasa, belanja tak terduga, bantuan sosial, dan bantuan hibah. Setelah peneliti melakukan pendalaman terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun setelah 2019 sampai rentang tahun 2021 pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah masih melakukan refocusing anggaran guna melakukan penanggulangan pandemi covid yang dibuktikan pada alokasi belanja modal yang mempunyai jumlah alokasi lebih sedikit dibandingkan belanja barang./jasa.

Belanja modal yang pada dasarnya menjadi pos untuk program-program pemerintah dalam pembangunan sarana fisik dan non fisik guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat agar taraf kehidupan semakin meningkat seharusnya mendapat alokasi yang cukup besar untuk tahun-tahun berikutnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irianto ,Baiq Kisnawati Istiarto, Bq.Ertin Helmida,2021) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, namun bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan (Ida ayu candra dan yunita sari & Ni luh supadmi 2016) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap belanja modal.

4.4.4 Hubungan Sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan negatif terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata hipotesis tersebut ditolak. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang kurang dari nilai sig 0,05 dan nilai t-hitung 3,852 yang lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,97393, selain itu pada hasil uji regresi untuk variabel sisa lebih pembayaran mendapatkan nilai koefisien regresi beta sebesar 8,846E-12 yang bernotasi positif. Atas hasil uji tersebut dapat dipahami bahwa variabel sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap variabel terikat yaitu indeks pembangunan manusia pada pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara pos pendapatan dikurangi dengan pos belanja. Adanya Sisa lebih pembiayaan anggaran ini dapat menjadi pedang bermata dua atau mempunyai dua makna, yaitu SiLPA dapat mengindikasikan adanya efisiensi terhadap penggunaan anggaran pemerintah dalam menjalankan program-programnya dengan tidak menghambur-hamburkan anggaran ataupun dapat juga bisa mengindikasikan tidak terjadi kebocoran anggaran-anggaran pemerintah seperti mark up harga ataupun penyelewengan lain, namun di sisi lain adanya SiLPA juga dapat bermakna bahwa pemerintah kurang mampu merealisasikan program-program yang telah dibuatnya, hal tersebut bisa terjadi karena salah satu faktor yaitu keterbatasan waktu

penyelesaian program atau dengan kata lain program pemerintah terlambat diselesaikan.

Pada hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh signifikan positif terhadap IPM juga dapat diartikan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi Jawa Tengah telah melakukan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran dapat digunakan salah satunya untuk membantu pemerintah dalam mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung sehingga pembangunan daerah yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya dapat dilaksanakan kembali.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indiyanti dan Rahyuda, 2018), namun bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Verawaty dkk, 2020) yang menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan negatif terhadap indeks pembangunan manusia

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan sisa lebih pembiayaan anggaran pada pemerintah kabupaten/kota se-provinsi jawa tengah pada periode tahun anggaran 2019-2023, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah kabupaten/kota se-provinsi jawa tengah
2. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah kabupaten/kota se-provinsi jawa tengah
3. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah kabupaten/kota se-provinsi jawa tengah
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah kabupaten/kota se-provinsi jawa tengah

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan peneliti atas hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi Jawa Tengah harus lebih bijak dalam menggunakan alokasi dana alokasi umum walaupun pada dasarnya penggunaan dana tersebut bersifat *block grant*. Diperlukan program-program oleh pemerintah daerah yang dapat mengurangi celah fiskal daerahnya sehingga alokasi dana alokasi umum dari pemerintah pusat dapat berkurang sehingga kemandirian pemerintah daerah dapat terwujud dan mengurangi ketergantungan
2. Pemerintah daerah perlu lebih bijak lagi dalam mengalokasikan belanja modal pemerintah yang lebih ditujukan untuk merealisasikan program yang mempunyai manfaat secara langsung dan jangka panjang guna meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga terwujud meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel-variabel lain yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia, karena berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi atas penelitian ini, variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 51,7% yang berarti terdapat faktor lain selain variabel independen dalam penelitian ini yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia sebesar 48,3%.

DAFTAR PUSTAKA

Sarkoro, Hastu. Zulfikar.2016. Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Universitas muhammadiyah surakarta. Surakarta

Irianto. Kisnawati Baiq,Istiarto.Helmida BQ Ertin. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat). STIE AMM Mataram. Mataram

Sari, Ida Ayu Candra Yunita. Supadmi Ni Luh. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan indeks pembangunan manusia. Universitas Udayana. Bali

Rahmayanti,Anim.Pertiwi, Imanda Firmansyah putri. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia. IAIN Surakarta.Surakarta

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Semarang Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kendal Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Demak Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Batang Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Tegal Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Brebes Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pati Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kudus Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pemalang Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Jepara Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Rembang Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Blora Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Banyumas Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Cilacap Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Magelang Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Temanggung Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Purworejo Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kebumen Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Klaten Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Boyolali Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sragen Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sukoharjo Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Semarang Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kendal Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Demak Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Batang Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Tegal Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Brebes Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pati Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kudus Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pemasang Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Jepara Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Rembang Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Blora Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Banyumas Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Cilacap Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Magelang Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Temanggung Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Purworejo Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kebumen Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Klaten Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Boyolali Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sragen Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sukoharjo Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Semarang Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kendal Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Demak Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Batang Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Tegal Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Brebes Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pati Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kudus Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pemalang Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Jepara Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Rembang Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Blora Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Banyumas Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Cilacap Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Magelang Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Temanggung Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Purworejo Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kebumen Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Klaten Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Boyolali Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sragen Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sukoharjo Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Semarang Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kendal Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Demak Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Batang Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Tegal Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Brebes Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pati Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kudus Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pemasang Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Jepara Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Rembang Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Blora Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Banyumas Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Cilacap Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Magelang Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Temanggung Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Purworejo Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kebumen Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Klaten Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Boyolali Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sragen Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sukoharjo Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Semarang Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kendal Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Demak Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Batang Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Tegal Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Brebes Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pati Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kudus Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pemalang Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Jepara Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Rembang Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Blora Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Banyumas Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Cilacap Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Magelang Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Temanggung Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Purworejo Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kebumen Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Klaten Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Boyolali Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sragen Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sukoharjo Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2023

[https://boyolalikab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#:~:text=Indeks%20Pembangunan%20Manusia%20\(IPM\)%20mengukur,pengetahuan%2C%20dan%20kehidupan%20yang%20layak](https://boyolalikab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#:~:text=Indeks%20Pembangunan%20Manusia%20(IPM)%20mengukur,pengetahuan%2C%20dan%20kehidupan%20yang%20layak). diakses pada 28 april 2024 jam 17.56

<https://banyumaskab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTMjMg==/pdrb-kabupaten-banyumas-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>

diakses pada tanggal 20 September 2024